

**KEBIJAKAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA  
WISATA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN  
BULELENG**

**Oleh : Putu Agustana<sup>1</sup> dan I Nyoman Suprapta<sup>2</sup>**

**Abstraksi**

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan di Bali. Untuk itu pengelolaan pariwisata yang diserahkan kepada Desa Adat dengan berbagai kebijakannya akan lebih memberikan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Bali secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa implementasi kebijakan desa adat Pemuteran dalam pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mengambil alih pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata yang bernuansa religius seperti Pura Yeh Panes, Pura Bukit Udeng-Udeng dan Pura Batu Kursi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada krama desa adat Pemuteran. Juga bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa adat. Pengelolanya diserahkan semua kepada krama desa adat Pemuteran dengan menugaskan anggota Pecalang secara bergiliran menjaga pura-pura tersebut suasana Pura yang berada di sekitar perbukitan dan dekat dengan areal hutan menjadi pendukung dalam menarik minat wisatawan khususnya wisatawan yang menyukai nuansa religius.

Perkembangan pariwisata di desa wisata Pemuteran tentunya membawa dampak yang baik bagi kehidupan perekonomian krama desa adat Pemuteran. Juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya krama desa adat pemuteran. Adanya perkawinan antara wanita krama desa adat Pemuteran dengan laki-laki mancanegara adalah salah satunya. Pemasukan dari pengelolaan beberapa objek wisata juga bisa digunakan untuk mengembangkan kebudayaan diantaranya untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan desa adat.

**Kata kunci : Kebijakan, desa adat, pariwisata**

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Unipas email. Putu.agustana@unipas.ac.id

<sup>2</sup> Staf Pengajar Unipas email. Nyoman.suprapta@unipas.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara atau daerah sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah inilah yang nantinya diharapkan dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Seperti yang disampaikan oleh Indiahono (2018), bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada sebesar-besarnya kepentingan publik.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih diprioritaskan pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Secara teori, implementasi dapat dikatakan sebagai sesuatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Masmanian dan Sabatier dalam Abdulwahab, 2017)

Salah satu sektor yang menjadi andalan dalam pembangunan di Bali dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara umum adalah sektor pariwisata. Kegiatan pariwisata selain mendatangkan sumber pendapatan utama di Bali, juga dapat menjadi ancaman serius bagi sebagian orang, dan lingkungan, termasuk bagi wisatawan asing yang mencintai keaslian alam, kualitas lingkungan hidup, nilai-nilai moral, sosial budaya dan keberlanjutannya.

Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa dan lestariannya fungsi lingkungan. Namun demikian pembangunan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada intinya pembangunan kepariwisataan Indonesia harus selalu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan (Ardika,2002). Norma-norma dan nilai dasar tersebut mewarnai perilaku pembangunan kepariwisataan

nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini merupakan keunggulan komparatif pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil kebudayaan bangsa Indonesia.

Falsafah pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa sumber daya alam maupun lingkungan geografis. Konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali disebut dengan "*Tri Hita Karana*". Hal ini didukung oleh pendapat Erawan (2006), menekankan agar pariwisata kembali dibangun dengan menjunjung konsep *Tri Hita Karana*, yaitu :

1. *Parahyangan*, yaitu hubungan manusia dengan Ida Sanghyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa dengan baik
2. *Pawongan*, dimana hubungan antar manusia terjadi keharmonisan
3. *Pelemahan*, yakni hubungan manusia dengan alam sekitarnya dalam kondisi lestari dan baik.

Konsep ini merupakan kearifan lokal Bali dalam menjaga keseimbangan alam Bali (Beratha, 2007), dapat membentuk perilaku yang ajeg pada masyarakat Bali kendatipun didera bencana ledakan bom yang terjadi sampai dua kali yakni pada tahun 2002 dan tahun 2005. Masyarakat Bali tetap tenang dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut, berbagai solusi dan terobosan diupayakan untuk memulihkan pariwisata Bali dengan tetap menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat pada dunia, kondisi ini memberikan andil yang besar dalam memulihkan pariwisata di Bali. Kendatipun akibat krisis ekonomi dan kehilangan pekerjaan masyarakat Bali, tidak berputus asa.

Dalam pengembangan pariwisata khususnya dalam pengelolaan suatu kawasan wisata atau objek wisata, Pemerintah Provinsi Bali lebih mengedepankan peranan desa adat. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat Pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari aktifitas adapt dan keagamaan khususnya agama Hindu. Di samping itu keberadaan desa

adat dinilai lebih mampu untuk membendung serta mencegah dampak-dampak negatif dari adanya pariwisata di Bali, karena desa adat memiliki *awig-awig* ( peraturan-peraturan ) yang mengatur kehidupan warganya dan sangat dipatuhi oleh *krama* desa adat.

Hal ini juga disikapi oleh masyarakat di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Dengan mengandalkan lokasi yang *Nyegara Gunung* mengambil langkah dan inisiatif untuk pengembangan wisata alam bernuansa lingkungan. Dengan mengandalkan objek wisata keindahan alam pantai dan laut yang dihiasi dengan beraneka ragam terumbu karang, serta banyak terdapat tempat suci Pura yang bisa dijadikan sebagai objek wisata spritual, desa adat Pemuteran berusaha mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara umum.

Objek wisata Desa Pemuteran adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, yang memiliki pesona keindahan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya adalah adanya event tahunan yang dinamakan Pemuteran Bay Festival, yang sudah diadakan sejak tahun 2015. Pemuteran Bay Festival menaungi segala bentuk seni budaya dan pelestarian lingkungan seperti pelestarian terumbu karang berbasis masyarakat dengan *Tekhnologi Biorock, Heritage Culture Gebug Ende, Beach Art Parade*, lomba-lomba seni dan budaya, Pameran Produksi Seni dan kerajinan dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata berbasis masyarakat, berbudaya, berwawasan lingkungan. Event Pemuteran Bay Festival juga masuk 100 kalender event di Indonesia atau CoE Indonesia. Pemuteran Bay Festival mempersembahkan selebrasi budaya dengan semangat komunitas dengan berlandaskan *ecotourism*.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di Desa Pemuteran adalah masih seringnya terjadi kelakuan dari oknum-oknum nelayan yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penangkapan ikan hias dengan menggunakan zat yang berbahaya yakni potasium yang berbahaya bagi kelestarian dan pertumbuhan terumbu karang. Untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang tersebar di wilayah pantai Desa Pemuteran, sejak tahun 2011 Desa Adat Pemuteran membentuk Pecalang Laut, yang tugasnya adalah mengadakan patroli di laut mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berkeinginan merusak kelestarian dan keindahan terumbu karang yang menjadi daya tarik wisatawan. Dimana dengan melakukan *diving* dan *snorkling*, wisatawan dapat menikmati indahnya terumbu karang di laut Desa Pemuteran.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Pemuteran Kecamatan Gerokgak ?
2. Bagaimanakah dampak perkembangan pariwisata terhadap kehidupan krama desa adat Pemuteran Kecamatan Gerokgak ?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2019:3), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: Perbekel Desa Pemuteran beserta perangkat desa, Kelian Desa Adat Pemuteran, Ketua BPD, Ketua LPM, Para pelaku Pariwisata dan masyarakat Desa Pemuteran. Informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam Pengelolaan pariwisata, yang meliputi : a) kebijakan desa adat; b) proses implementasi kebijakan desa adat; c) aktor-aktor pengelola destinasi wisata, dan d) faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata.
2. Dampak perkembangan pariwisata terhadap kehidupan *krama desa adat* Pemuteran, yang meliputi : dampak ekonomi, sosial dan budaya.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wisata Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data mengikuti apa yang disampaikan Miles dan Huberman ( Sugiyono, 2017 ), yakni dengan empat tahapan analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi Kebijakan Desa Adat dalam Pengelolaan Pariwisata

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan ( Winarno, 2019 ). Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Sehubungan dengan kebijakan Desa Adat Pemuteran dalam pengelolaan berbagai objek wisata khususnya objek wisata bernuansa religius, menerapkan kebijakan yang berusaha untuk memberikan kesejahteraan bagi *krama desa* secara menyeluruh. Salah satunya dengan menempatkan anggota Pecalang untuk berjaga di objek wisata religius seperti Pura-Pura yang ada di wilayah Desa Adat Pemuteran dan ditugaskan untuk memungut retribusi dan biaya parkir kepada wisatawan yang datang berkunjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelian Desa Adat Pemuteran dan Perbekel Desa Pemuteran tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pengelolaan objek wisata berupa Pura-Pura sebagai objek wisata bernuansa religi diserahkan sepenuhnya kepada Desa Adat Pemuteran memang dimaksudkan untuk kesejahteraan *krama desa* adat Pemuteran, khususnya yang berkaitan dengan acara-acara adat dan keagamaan. Dalam hal ini kebijakan Desa Adat Pemuteran mengelola secara penuh objek-objek wisata religi memang demi kepentingan *krama desa* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Merilee S. Gridnle ( Subarsono, 2020 ), yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah harus mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Dalam hal ini kepentingan *krama desa adat* Pemuteran menjadi target utama dalam kebijakan tersebut.

Selanjutnya proses implementasi kebijakan Desa Adat Pemuteran sehubungan dengan pengelolaan objek wisata religi adalah dengan menunjuk orang-orang yang dipercaya oleh Desa Adat Pemuteran untuk mengelola secara langsung beberapa objek wisata religi seperti Pura Yeh Panas, Pura Batu Kursi, dan Pura Bukit Udeng-Udengan. Desa adat kemudian menunjuk anggota

Pecalang untuk berjaga dan memungut retribusi kepada para wisatawan yang datang berkunjung atau bersembahyang ke Pura-Pura tersebut. Untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya tiket masuk dan biaya parkir. Sedangkan untuk wisatawan lokal yang tujuannya datang untuk bersembahyang, hanya dikenakan biaya parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Desa Adat Pemuteran sebagai hasil kesepakatan tentang pengelolaan objek-objek wisata relegi dimana semua hal yang dilakukan oleh Desa Adat Pemuteran diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni meningkatkan pendapatan Desa Adat dan kesejahteraan *krama desa*. Hal ini sesuai dengan pengertian implementasi kebijakan yang disampaikan oleh van Meter dan van Horn ( Winarno, 2019 ), bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu – individu (atau kelompok – kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan Desa Adat dalam pengelolaan pariwisata khususnya destinasi wisata berupa objek-objek wisata relegi adalah berkaitan dengan aktor-aktor pengelola destinasi wisata tersebut. Yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan destinasi objek wisata relegi tentunya adalah Kelian Desa Adat Pemuteran dibantu oleh para *prajuru* Desa Adat dan seluruh *krama desa* khususnya Pecalang yang berjaga di areal Pura yang dijadikan sebagai objek wisata relegi.

Hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa penentuan seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan ( sebagai implementor ) berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Pura haruslah memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan implementor tersebut, seperti yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono, 2020 ), bahwa variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan salah satunya adalah Disposisi implementor, yang mencakup tiga hal penting, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pengelolaan objek wisata relegi yang sepenuhnya diserahkan kepada Desa Adat Pemuteran berdampak positif terhadap perkembangan kunjungan wisata ke objek wisata Pura seperti Pura Yeh Panas, Pura Batu Kursi, dan Pura Bukit Udeng-Udeng dan juga kelestarian kawasan wisata tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang memungkinkan tetap terpeliharanya kebersihan dan kesucian serta kesakralan Pura-Pura tersebut.

Keberadaan Pura-Pura di wilayah Desa Adat Pemuteran yang dijadikan sebagai objek wisata relegi memang menarik bagi wisatawan. Salah satunya adalah Pura Yeh Panas, dimana di dalam areal Pura terdapat pancuran air panas yang merupakan air panas alami yang biasa digunakan oleh para wisatawan khususnya yang beragama Hindu untuk membersihkan diri (*melukat*). Keberadaan Pura-Pura yang lainnya yang terletak didaerah perbukitan juga menjadi daya tarik tersendiri karena pemandangan alamnya yang indah serta letaknya yang dekat hutan menimbulkan kesan angker yang disukai oleh wisatawan yang menginginkan suasana yang tenang, dan ada nuansa mistisnya.

Pengelolaan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Pemuteran berdampak positif terhadap perkembangan kunjungan wisata ke Desa Wisata Pemuteran dan juga kelestarian kawasan wisata tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang memungkinkan tetap terpeliharanya kesucian pura, keindahan pantai dan kelestarian satwa laut khususnya ikan dan terumbu karang yang ada.

Bahkan keberadaan Desa Wisata Pemuteran semakin berkembang dengan diadakannya secara rutin sebuah festival yang diberinama "Pemuteran Bay Festival", dimana untuk tahun ini diselenggarakan pada tanggal 16 – 18 Nopember 2023 dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno..

Seperti diketahui Pemuteran Bay Festival sudah diadakan sejak tahun 2015. Pemuteran Bay Festival menaungi segala bentuk seni budaya dan pelestarian lingkungan seperti pelestarian terumbu karang berbasis masyarakat dengan *Tekhnologi Biorock*, *Heritage Culture Gebug Ende*, *Beach Art Parade*, lomba-lomba seni dan budaya, Pameran

Produksi Seni dan kerajinan dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata berbasis masyarakat, berbudaya, berwawasan lingkungan. Event Pemuteran Bay Festival juga masuk 100 kalender event di Indonesia atau CoE Indonesia. Pemuteran Bay Festival mempersembahkan selebrasi budaya dengan semangat komunitas dengan berlandaskan *ecotourism*.

Selanjutnya, hal yang menjadi penghambat pengelolaan pariwisata di desa wisata Pemuteran salah satunya adalah masih adanya nelayan-nelayan yang membandel yakni yang menangkap ikan hias menggunakan racun ikan seperti potasium yang tentunya berdampak negatif terhadap kelestarian dan keasrian terumbu karang dan ikan-ikan di perairan laut Desa Pemuteran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa masih adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan merusak kelestarian alam bawah laut yang menjadi andalan pariwisata di desa wisata Pemuteran dengan terumbu karang dan ikan hiasnya, tentunya menjadi penghambat bagi perkembangan dan pengelolaan pariwisata di desa wisata Pemuteran. Padahal keindahan panorama bawah laut wilayah Desa Pemuteran dengan keberagaman terumbu karang serta ribuan ikan hias menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan khususnya yang memiliki hoby snorkling dan diving. Bahkan komunitas penyelamat terumbu karang yang bernaung di bawah Yayasan Karang Lestari, berusaha melestarikan keindahan panorama alam bawah laut tersebut dengan menanam atau membuat terumbu karang buatan.

### **3.2 Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap kehidupan *krama desa* adapt Pemuteran**

Dijadikannya suatu daerah sebagai kawasan wisata atau tempat kunjungan bagi wisatawan, akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada daerah tersebut. Perubahan-perubahan tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya kehadiran orang-orang dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri yang banyak berkunjung atau bahkan menetap untuk beberapa waktu ditempat tersebut. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan lingkungan alam, bahkan terpenting adalah dampak dari adanya perkembangan pariwisata tersebut adalah

terjadinya perubahan dalam pola kehidupan dan tingkah laku dari masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata.

Sejak ditetapkannya desa Pemuteran sebagai Desa wisata, setiap harinya daerah tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Adanya destinasi wisata berupa pantai dan alam pegunungan dengan keberadaan tempat-tempat suci Agama Hindu yang dijadikan sebagai objek wisata, yang setiap harinya selalu ramai dikunjungi wisatawan, tentunya memberi manfaat bagi *krama desa* Adat Pemuteran

Yang pertama tentunya secara ekonomi perkembangan pariwisata memberi nafkah bagi pemilik dan pekerja di berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel, restaurant, pemandu wisata, serta pedagang asongan yang setiap harinya berjualan diberbagai objek wisata yang ada di desa wisata Pemuteran.

Di samping memiliki dampak ekonomi yang dirasakan oleh *krama desa* yang bekerja pemandu wisata diving dan snorkling, keberadaan desa wisata Pemuteran sebagai rujukan bagi para wisatawan juga memberi berkah bagi para *krama desa* yang bekerja di hotel maupun restaurant yang ada di desa Wisata Pemuteran.

Selain dampak ekonomi yang terjadi karena adanya perkembangan pariwisata terhadap kehidupan *krama desa* Adat Pemuteran seperti yang telah diuraikan di atas, dampak sosial dan budaya juga terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata tersebut. Salah satunya yang paling menonjol adalah adanya perkawinan transnasional antara perempuan etnis Bali dengan laki-laki mancanegara.

Interaksi yang intensif antara wisatawan mancanegara dengan penduduk lokal khususnya yang berasal dari Desa Pemuteran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perkawinan antara laki-laki mancanegara tersebut dengan perempuan lokal. Hal ini disebabkan karena di wilayah Desa Adat Pemuteran banyak dijumpai villa yang banyak dihuni oleh wisatawan mancanegara. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan tersebut memang didasari oleh adanya keinginan untuk menyalurkan rasa cinta kasih yang ada pada diri mereka. Perkawinan transnasional dalam lingkaran hidup perempuan lokal atau

*krama desa* Adat Pemuteran, melalui proses atau tahapan masa perkenalan, penjajagan, berpacaran dan menikah.

Dalam hubungannya dengan pengesahan perkawinan antar bangsa tersebut, Desa Adat Pemuteran memiliki ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan secara adat yang telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat. Di dalamnya dimuat ketentuan bahwa pasangan perempuan etnis Bali yang akan menikah dengan laki-laki asing harus memenuhi persyaratan, yakni 1. memberi laporan kepada Kelian Desa Adat tentang rencana perkawinan mereka; 2. selanjutnya pihak laki-laki harus menunjukkan surat tentang status yang dikeluarkan oleh Konsulat negaranya ; 3. pihak laki-laki menyatakan kesediaannya untuk melangsungkan upacara *sudiwidani* yakni sebuah upacara peralihan dari agama asal ke agama Hindu.

Laporan tentang rencana akan dilangsungkannya perkawinan tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal dari *prajuru* desa adat untuk membuat laporan selanjutnya. Pentingnya pihak laki-laki memberi laporan tertulis tentang statusnya sebenarnya merupakan langkah pengamanan atau perlindungan kepada *kramanya* agar tidak ditipu oleh orang asing. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka mulailah langkah berikutnya yaitu pelaksanaan upacara *sudiwidani*. Upacara ini dilengkapi dengan perlengkapan bebantenan diantaranya *pejati*, *canang pengrawos*, dll. Upacara disaksikan oleh keluarga besar, Kelian Desa Adat, Perbekel, sedangkan pihak laki-laki biasanya dihadiri oleh anggota keluarga atau teman yang dipercaya. Upacara ini berlangsung di lingkungan keluarga perempuan.

Serangkaian upacara *sudiwidani* dilakukanlah kegiatan pencatatan dalam *Ilikita Wiwaha Putra*. Dalam pencatatan tersebut dimuat nama mempelai, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua mempelai dan status mempelai.

Ada kalanya pasangan calon mempelai yang akan menikah tidak memilih jalur adat sebagai pengesahan perkawinannya tetapi memilih jalan di luar keterlibatan adat. Dalam hubungan ini desa adat dan desa dinas hanya mengeluarkan surat pelepasan yang intinya menjelaskan bahwa secara normatif warganya tidak lagi ada di bawah tanggung jawab desa adat maupun desa dinas.

Dipilihnya cara ini biasanya dilatar belakangi karena pihak laki-laki tidak bersedia beralih agama dan seterusnya bermaksud memboyong pihak perempuan untuk ikut serta ke negaranya.

Dalam konteks adanya perkawinan transnasional antara perempuan etnis Bali dengan laki-laki mancanegara, terdapat stereotip yang melekat terhadap kehadiran orang asing dan perempuan lokal yang dekat dengan orang asing. Stereotip perempuan lokal adalah “hanya perempuan nakal” saja yang mau menjalin hubungan dengan laki-laki asing.

Stereotip yang bernada negatif terhadap hubungan khusus yang dijalin oleh perempuan lokal dengan orang asing dilandasi anggapan bahwa orang asing banyak duit, suka perempuan muda, dan sebagainya. Anggapan ini berakibat munculnya pandangan bahwa perempuan lokal mau dekat dengan laki-laki asing karena motif ekonomi. Mereka dicap sebagai “cewek matre”. Di samping itu beda usia yang sangat jauh ( 15 – 30 tahun ) berakibat munculnya pandangan bahwa hanya karena dollar dia mau pacaran atau menikah walau pasangannya sudah tua.

Adanya anggapan dari masyarakat bahwa perempuan lokal yang berpacaran dengan orang asing adalah perempuan nakal, dirasa merugikan bagi perempuan lokal yang memang menjalin hubungan dengan orang asing atas dasar cinta. Mereka yang sebenarnya serius membina hubungan dengan orang asing ternodai oleh ulah perempuan-perempuan yang disebut sebagai ceweke matre tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan tersebut di atas, dapat ditemukan bahwa perkembangan pariwisata di desa adat pemuteran serta ditetapkannya desa pemuteran sebagai Desa Wisata memberikan dampak secara ekonomi dan sosial budaya kepada kehidupan *krama desa* Adat Pemuteran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Islamy ( 2018 ) bahwa dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan temuan melalui hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Desa Adat Pemuteran dalam pengelolaan pariwisata ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada krama desa Adat Pemuteran, dengan cara memberdayakan krama desa untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut serta bertanggung jawab terhadap kelestarian objek-objek wisata seperti pantai, laut, dan pura.
2. Perkembangan pariwisata di desa Pemuteran membawa dampak terhadap kehidupan krama desa Adat Pemuteran. Dalam hal ini dampak ekonomi dari banyaknya krama yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sektor pariwisata, baik sebagai pekerja hotel dan restoran atau pemandu wisata maupun sebagai pedagang makanan dan minuman serta dari menyewakan alat-alat penyelam kepada wisatawan. Juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan budaya krama desa Adat Pemuteran, terbukti dari adanya perkawinan transnasional antara perempuan lokal krama desa Adat Pemuteran dengan laki-laki mancanegara

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disarankan beberapa hal :

1. Pembangunan pariwisata melalui peran institusi lokal desa adat dapat dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan kontribusi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan *krama*, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Mengingat pentingnya posisi desa adat di dalam masyarakat, sebagai kekuatan lokal yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat, ketimbang kekuatan manapun termasuk kebijakan pemerintah.
2. Kontrol sosial dan pengawasan dari *prajuru* desa adat beserta seluruh krama dan instansi terkait agar lebih ditingkatkan sbagai upaya untuk mencegah atau meminilisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan pariwisata, seperti adanya peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan generasi muda, terjerumusnya generasi muda dalam dunia prostitusi, serta dampak-dampak negatif lainnya seperti adanya pengaruh

budaya asing yang tentunya dapat merusak dan mencemari kesucian dan kelestarian kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin, 2017, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta
- Ardika,I Gede, 2002. *Konsepsi Pembangunan Kepariwisata Indonesia*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia : Jakarta.
- Beratha,Dewa Putu,2007. “Kearifan Lokal Bali dalam Menjaga Alam” dalam *Bali Post*,Denpasar,1 November 2007.
- Dewi Riyani,Desak Putu dan Gede Sandiasa, 2017, Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Pariwisata di Objek Wisata Air Sani, *LOCUS Majalah Ilmiah FIA UNIPAS* Volume 7 No.1- Pebruari 2017
- Erawan,Puja, 2006. “Bali Berwawasan Pariwisata Budaya” *Makalah*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng : Singaraja
- Indiahono,Dwiyanto, 2018, *Kebijakan Publik,Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media : Yogyakarta
- Islamy,Irfan, 2018, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara Jakarta
- Subarsono, AG. 2020, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*,Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D*, Alfabet : Bandung
- Winarno, Budi. 2019. *Kebijakan Publik Teori & Proses*,Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wyasa P.,Ida Bagus,dkk, 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Aditama : Bandung
- Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.